a



**LKIP**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

**Triwulan I Tahun 2025**

**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

**Kabupaten Luwu Timur**

**Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (0474) 321423**

**Dinas**

**Dagkop-UKMP**

**Lutim**

** KATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PENGANTAR** |  |
| Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 telah selesai.  Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sepanjang Triwulan I Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2025 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil  Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2025.  Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara umum target pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal.  Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan I Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.  Akhir kata, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.  Malili, April 2025  KEPALA DINAS,  **SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**  Pangkat : Pembina Utama Muda  Nip. 19751001 199612 1 001 | |
|  | |

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**………………………………………………………………………………………………. ii

**DAFTAR ISI**…………………………………………………………………………………………………………..iv

**BAB I PENDAHULUAN**…………………………………………………………………………………….1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………………………1

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah………………………………………………….2

1.3 Sumber Daya Aparatur…………………………………………………………………….7

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah…………………………8

1.5 Landasan Hukum………………………………………………………………….………..9

1.6 Sistematika Penulisan……………………………………………………………………..10

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**……………………………………………………………………12

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026………………………..………………………12

2.2 Tujuan dan Rencana Strategis……………………………………………………..….13

2.3 Indikator Kinerja Utama………………………………………………………………….14

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025…………………………………………………………15

2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025……………………………………………………….15

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**……………………………………………………..………….17

3.1 Capaian Kinerja Organisasi…………………….……………………………………....18

3.2 Analisa Capaian Kinerja Organisasi………………………………………………….19

3.3 Analisa Efisiensi Sumber Daya……… …………………………………………………36

3.4 Analisas Sebab Keberhasilan/Kegagalan……………………………………………38

3.5 Realisasi Anggaran………………………………………………………………………..102

**BAB IV PENUTUP**……………………………………………………………………………………………115

4.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………………..115

4.2 Saran…………………………………………………………………………………………..116

4.3 Rencana Tindak Lanjut ................................................................. .116

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Triwulan anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***Good Govarnance*** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
5. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
6. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Perdagangan;
4. Bidang Koperasi;
5. Bidang UMKM;
6. Bidang Perindustrian
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

***Tugas Sekretariat*** adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta menberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

* 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Bidang Perdagangan*** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dlam negeri;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan , pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Bidang Koperasi*** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah***  adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Perindustrian***  adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



**1.3 Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2024 sebanyak 45 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 27 ASN, 1 orang PPPK dan tenaga upah jasa sebanyak 17 orang . Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

**Grafik 1.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan,**

**Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur**

**Tahun 2025 (orang)**

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur*

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.

**Grafik 1.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi,**

**Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (orang)**

*Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur*

**1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis, antara lain:

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :

1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM.

2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.

3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.

4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajelala yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.

5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM

6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

1. Bidang Perdagangan :

1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.

2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.

3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.

4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosilaisasi kemudahan ekspor dan impor .

1. Bidang Perindustrian :

1. Masih rendahnya produktifitasi IKM.

2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM.

3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM.

4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM.

**1.5 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LIngkungan Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

**I.6 Sistematika Penulisan**

**Bab. I - Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

**Bab II - Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

*A. Capaian Kinerja Organisasi*

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

* 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. *Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan I Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

****

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

**II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI

**“ Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (enam)*** *dari* Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI II

“**Mengembangan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas ”**



MISI IV

“***Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”***

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan “***Perekonomian yang Berdaya Saing”***.

**II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : “*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*”  Misi II : “Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berbudaya Saing dan Berjaring Luas ***“*** | | |
| **NO** | | **TUJUAN** | **SASARAN** |
| 1 | | Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| 2 | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM | Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : “*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*”  Misi IV : “Menciptakan Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik“ | | |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | |

**II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** |
| 1 | Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | * Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun |
| 2 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM | Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM | * Pertumbuhan nilai produksi IKM * Pertumbuhan nilai produksi UMKM * Persentase Koperasi aktif * Pertumbuhan sub sektor perdagangan |

**II.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025 pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

**II.4 RENCANA ANGGARAN DISDAGKOPRINUM TAHUN 2025**

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 27.529.017.596-** *(Dua puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).*

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Program | Pagu Anggaran |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.092.699.997,- |
| 2 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rp. 27.668.500,- |
| 3 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 134.546.600,- |
| 4 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Rp. 60.043.100,- |
| 5 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp. 31.550.100,- |
| 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Rp. 334.435.000,- |
| 7 | Program Pengembangan UMKM | Rp. 230.971.000,- |
| 8 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. 20.062.107.400- |
| 9 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp. 500.707.156,- |
| 10 | Program Pengembangan Ekspor | Rp. 262.367.443,- |
| 11 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Rp. 111.621.100,- |
| 12 | Program Perencanaan Pembangunan Industri | Rp. 614.736.800,- |
| 13 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Rp. 31.042.000,- |
| 14 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp. 34.521.000,- |

****

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksankan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan I. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

**III.1** **CAPAIAN KINERJA ORANISASI**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
| 1. | AA | ˃90 | Sangat memuaskan |
| 2. | A | ˃80-90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3. | BB | ˃70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4. | B | ˃60-70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5. | CC | ˃50-60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban |
| 6. | C | ˃30-50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7. | D | 0-30 | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar |

**III.2** **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 1

Capaian Kinerja I Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis I | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun | 98% | 105,12% | 107,26% |

**1.1 Capaian Sasaran Strategis 1 :**

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Variabel pengukuran dalam meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang didukung oleh 1 (satu) variabel pengukuran yaitu :

1. Kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Stabilitas harga barang 9 (Sembilan) kebutuhan pokok untuk 39 jenis komoditi pada triwulan I tahun 2025 terjaga dan relatif tidak bergejolak hal ini tidak terlepas dari upaya dinas perdagangan dalam melakukan pemantauan langsung (real time) harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan kab.Luwu Timur. Dengan adanya pemantauan tersebut maka berbagai perubahan yang dinilai signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan dapat direspon dengan cepat. Stabilisasi harga kebutuhan pokok diwilayah luwu timur khususnya juga didukung oleh penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara produsen dan distributor. Rendahnya disparitas harga antar kecamatan diwilayah kabupaten luwu timur dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di kabupaten luwu timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.

**3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis I**

* + **Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun**

**- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 1

Realisasi Indikator Sasaran I Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis I | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun | 98% | 105,12% | 107,26% |

Penjelasan:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama “ *Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “* triwulan I tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan ketersediaan barang pokok dan barang penting sepanjang tahun. Barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega , daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas elpiji 3 kg, solar dan pertalite. Triwulan I pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun mencapai 105,12% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 107,26%. Pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 mencapai angka diatas 100% disebabkan stok barang pokok sepanjang triwulan I tahun 2025 yang meliputi beras, gula pasir, minyak goring/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, garam beryodium serta barang penting yaitu pertalite melebihi kebutuhan masyarakat sedangkan jenis BBM berupa solar mengalami kekurangan sebesar 10,48% atau dihitung menggunakan liter kurang sebanyak 679.410 liter. Hal ini tergambar pada tabel dibawah :

**DAFTAR KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TRIWULAN I TAHUN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **STOK** | **KEBUTUHAN** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = (3/4)x100%** |
| **Triwulan I (Januari)** | |  |  |  |
| **A** | **SEMBAKO** |  |  |  |
| 1 | Beras | 3.457 Ton | 2.252 Ton | 153,51% |
| 2 | Gula Pasir | 216 Ton | 215 ton | 100,47% |
| 3 | Minyak Goreng/Mentega | 155.532 kg | 144.879 kg | 107,35% |
| 4 | Daging Sapi dan Ayam | 41 Ton | 40 Ton | 102,50% |
| 5 | Telur Ayam | 3.227.575 butir | 3.214.582 butir | |  | | --- | | 100,40% | | |
| 6 | Susu | 653.927 kg | 642.263 kg | 101,82% |
| 7 | Sayuran dan Buah-buahan | 828.997 kg | 827.998 kg | 100,12% |
| 8 | Garam Beryodium | 10 ton | 9 ton | 111,11% |
| 9 | Gas LPG 3 Kg | 297.310Tabung | 297.310  Tabung | 100% |
| **B** | **BBM SUBSIDI** |  |  |  |
| 1 | Solar | 1.933.530 liter | 2.160.000 liter | 89,52% |
| 2 | Pertalite | 2.792.340 liter | 2.736.000 liter | 102,60% |
| **RATA-RATA JANUARI TAHUN 2025** | | | | 106,26% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **STOK** | **KEBUTUHAN** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = (3/4)x100%** |
| **Triwulan I (Februari)** | |  |  |  |
| **A** | **SEMBAKO** |  |  |  |
| 1 | Beras | 3.419 Ton | 2.249 Ton | 152,02% |
| 2 | Gula Pasir | 216 Ton | 215 ton | 100,47% |
| 3 | Minyak Goreng/Mentega | 155.543 kg | 144.915 kg | 107,33% |
| 4 | Daging Sapi dan Ayam | 41 Ton | 40 Ton | 102,50% |
| 5 | Telur Ayam | 3.227.621 butir | 3.214.618 butir | |  | | --- | | 100,40% | | |
| 6 | Susu | 653.934 kg | 642.269 kg | 101,82% |
| 7 | Sayuran dan Buah-buahan | 828.112 kg | 828.342 kg | 100,09% |
| 8 | Garam Beryodium | 10 ton | 9 ton | 111,11% |
| 9 | Gas LPG 3 Kg | 297.310Tabung | 297.310  Tabung | 100% |
| **B** | **BBM SUBSIDI** |  |  |  |
| 1 | Solar | 1.933.530 liter | 2.160.000 liter | 89,52% |
| 2 | Pertalite | 2.792.340 liter | 2.736.000 liter | 102,60% |
| **RATA-RATA FEBRUARI TAHUN 2025** | | | | 106,12% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **STOK** | **KEBUTUHAN** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = (3/4)x100%** |
| **Triwulan I (Maret)** | |  |  |  |
| **A** | **SEMBAKO** |  |  |  |
| 1 | Beras | 3.174 Ton | 2.247 Ton | 141,26% |
| 2 | Gula Pasir | 215 Ton | 214 ton | 100,47% |
| 3 | Minyak Goreng/Mentega | 155.565 kg | 145.182 kg | 107,15% |
| 4 | Daging Sapi dan Ayam | 42 Ton | 41 Ton | 102,44% |
| 5 | Telur Ayam | 3.227.823 butir | 3.214.917 butir | |  | | --- | | 100,40% | | |
| 6 | Susu | 654.273 kg | 642.889 kg | 101,77% |
| 7 | Sayuran dan Buah-buahan | 829.762 kg | 828.854 kg | 100,11% |
| 8 | Garam Beryodium | 10 ton | 9 ton | 111,11% |
| 9 | Gas LPG 3 Kg | 325.700 Tabung | 325.700  Tabung | 100% |
| **B** | **BBM SUBSIDI** |  |  |  |
| 1 | Solar | 1.933.530 liter | 2.160.000 liter | 89,52% |
| 2 | Pertalite | 2.792.340 liter | 2.736.000 liter | 102,60% |
| **RATA-RATA MARET TAHUN 2025** | | | | 105,12% |

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran kinerja yang berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di masyarakat sangat mempengaruhi stabilisasi harga menjadi pondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sangat mempengaruhi stabilisasi harga di masyarakat.

Pencapaian positif ditunjukkan IKU 1 “ Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun”. Realisasi sebesar 105,12%,- dari target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%,-. (persen capaian 107,26%). Realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun tersebut diperoleh dari formula:

(Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan) x 100%

Berdasarkan Renstra 2021-2026, pencapaian sasaran startegis I dapat digambarkan pada grafik dibawah :

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan TW 1 Tahun 2024**

Tabel. 2

Realisasi Indikator Sasaran I TW.1 Tahun 2025

*(dibandingkan realisasi TW.1 Tahun 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis I | Indikator Kinerja | Realisasi TW.1 Tahun 2024 | Realisasi TW 1. Tahun 2025 |
| 1. | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | *108,60%* | *105,12%* |

Penjelasan:

Triwulan I Tahun 2025, realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sebesar 3,48%*,* sedangkan realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang untuk triwulan I tahun 2024 sebesar 108,60%. Kenaiakan realisasi tahun 2025 sebesar 3,48% dibandingkan tahun 2024, karena semakin kecil pencapaian maka semakin baik karena harga cenderung stabil.

Jenis barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas LPG, serta BBM.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 4

Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

*(dibandingkan target akhir jangka menengah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis I | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Target Akhir Renstra 2026 |
| 1. | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | *105,12%* | *100%* |

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 105,12% terhadap target akhir renstra sebesar 100% maka secara umum melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dengan peningkatan kinerja sebesar 5,12%. Peningkatan capaian kinerja dihitung dengan rumus formula :

% Peningkatan capaian kinerja = (Realisasi Indikator Kinerja Tahun n – Target Akhir Renstra) dibagi (Target Akhir Renstra) x 100%

= (105,12% - 100%)

x 100%

100%

= 5,12%

**- Perbandingan Capaian Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Secara Nasional**

Tabel. 5

Capaian Indikator Sasaran TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan capaian secara nasional)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis I | Indikator Kinerja | Capaian TW. I Tahun 2025 | Capaian Nasional |
| 1. | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | *105,12%* | *%* |

**(*sumber data :Laporan Kemendag periode januari-maret)***

Penjelasan:

Berdasarkan neraca pangan strategis nasional periode Januari-Maret 2025, ketersediaan seluruh komoditi pangan pokok strategis stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dengan laju pertumbuhan harga pangan triwulan I tahun 2025 masih terjaga dan terkendali.

Untuk Kabupaten Luwu Timur capaian kinerja persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan I tahun 2025 berada diangka 105,12% sedangkan untuk realisasi secara nasional berada di angka %. Pencapaian target nasional yang melebihi target dikuartal I tahun 2025 dipengaruhi oleh stabilnya harga barang kebutuhan pokok januari-maret 2025, juga didukung oleh realisasi koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu secara nasional sebesar %.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I :

1. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Sasaran program “Terciptanya stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang diukur dengan formula :

,

= 3,35%

KVpt = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;

Sn = Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama 1 tahun;

P = Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Periode** | **(Sn)** | **(P)** | **Koefisien variasi harga** |
| 1 | Januari | 38.632 | 1.202.136 | 3,21% |
| 2 | Februari | 45.578 | 1.247.654 | 3,65% |
| 3 | Maret | 43.657 | 1.368.318 | 3,19% |
| Rata-Rata Triwulan I | | | | 3,35% |

Penilaian ini merupakan penilaian indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik , karena harga cenderung stabil (semakin kecil dari nilai target yang ditentukan)

= 157,05%

Triwulan I Tahun 2025, terealisasi 3,35% persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dari target kinerja sebesar 7,8%. Capaian kinerja 157,05%. **Predikat kinerja sangat baik.**

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu :

1. **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan formula :

((Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali dibagi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan) x 100%

= (19 / 39) x 100%

= 48,71%

Sehingga realisasi dari kegiatan tersebut ditriwulan I tahun 2025 sebesar 48,71% dengan target yang ditetapkan sebesar 44% ( capaian 110,70%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali setiap triwulannya berada diangka yang stabil (tidak berfluktuasi) dengan 19 (tujuh belas) Jenis Kebutuhan pokok yang terkendali terhadap 39 (tiga puluh sembilan) kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar.

1. **Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan**

SasaranSub Kegiatan adalah tersedianya data jurnal harga dalam aplikasi sistem informasi perdagangan. Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan yang merupakan indikator dari sub

(Jumlah jurnal harga harian yang diinput kedalam aplikasi jurnal harga Dinas Perdagangan Propinsi pada triwulan n tahun n-

= 3 laporan

kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dapat dihitung dengan formula :

Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini ditriwulan I tahun 2025 sebanyak 3 laporan yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi dinas perdagangan propinsi Sulawesi selatan dengan target 3 laporan (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

**b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada hari raya keagamaan. Metode yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah menjual sembako kepada masyarakat dengan metode pengambilannya dapat diwakili oleh aparat desa atau masyarakat mengambil secara langsung. Harga yang diberikan kepada masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur. dalam sub kegiatan ini dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota pada tahun ke-n

= 11 Laporan

**2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang disalurkan dibagi Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang diterima) x 100%

= (7.751,62 ton / 11.850,08 ton) x 100%

= 65,41%

Realisasi untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota ditriwulan I tahun 2025 sebesar 65,41% dengan target 100% (capaian 65,41%) dengan predikat kinerja **Baik.**

1. **Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut yang dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi pada triwulan n tahun-n

= 15 Laporan

Pada triwulan I tahun 2025, terdapat 15 (lima belas) laporan penyaluran pupuk bersubsidi dari 5 (lima) distributor pupuk bersubsidi periode bulan Januari – Maret 2025. Adapun 5 (lima) distributor pupuk bersubsidi pupuk subsidi adalah :

1. PT. Pupuk Indonesia Niaga
2. PT. Graha Agro Nusantara
3. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
4. CV. Putra Bungsu Sesa
5. CV. Bunga Padi

Sehingga untuk sub kegiatan ini berdasarkan rencana aksi tahunan yang ditetapkan di triwulan I tahun 2025 diperoleh angka realisasi sebanyak 15 laporan dari target 15 laporan (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

**4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Sasaran program “Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP yang diukur dengan formula :

(Jumlah UTTP yang diadukan oleh konsumen yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi Jumlah UTTP yang diawasi) x 100%

= 0/9 x 100%

= 0%

Penilaian ini merupakan indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik kinerja pelayanan tera/tera ulang karena pengaduan UTTP semakin turun. Sehingga untuk persentase capaiannya sebagai berikut :

**=** 200%

Pada triwulan I, Belum ada pengaduan dari pemilik UTTP dari target 5% (capaian 200%). **Predikat kinerja sangat Memuaskan**

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu :

1. **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

Sasaran darikegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diawasi pada tahun berjalan) dibagi Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang) x 100%

= 9/13 x 100%

= 69,23%

Pada kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui cap tanda tera sah pada UTTP dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama SPBU** | **Kecamatan** | **Jumlah UTTP yang diawasi (nozzle)** |
| 1 | SPBU Wotu | Wotu | 2 |
| 2 | SPBU Burau | Burau | 3 |
| 3 | Pemilik usaha Penjual Minyak Goreng |  | 4 |
| **TOTAL** | | | **9** |

Pada tahun 2025 triwulan I, realisasi terhadap pengawasan UTTP sebesar 69,23% dari target yang ditetapkan sebesar 70% (capaian 98,90%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

1. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses tera/tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sub kegiatan ini dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada triwulan n- tahun n

= 13 alat UTTP

Terdapat 3 (tiga) kegiatan pelayanan tera/tera ulang pada triwulan I yang telah dilaksanakan dengan data sebagai berikut :

Pada sub kegiatan ini diperolah realisasi triwulan I tahun 2025 sebanyak 13 alat UTTP yang ditera, tera ulang dari target yang ditetapkan di triwulan I sebanyak 13 alat UTTP (capaian 18,57%). **Predikat kinerja sangat kurang.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Perusahaan/ Pemilik UTTP** | **Kecamatan** | **Jumlah UTTP** | **Tera Ulang** | **%** |
| 1 | SPBU 74.929.01 | Wotu | 4 | 4 | 100 |
| 2 | SPBU 75.929.17 | Burau | 7 | 7 | 100 |
| 3 | SPDN 79.929.04 | Malili | 2 | 2 | 100 |
| **TOTAL** | | | **13** | **13** | **100%** |

**III.3.1 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD untuk triwulan I tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 297.048.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.240.000,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **1,63%.** Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **178,52%,** sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar **176,89%.**

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Stategis I

TW. I Tahun 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Renstra** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target TW. I 2025** | **Realisasi**  **Kinerja** | **% Capaian**  **Kinerja** | **Realisasi Keuangan** | **% Capaian Keuangan** | **Predikat Kinerja** |
| Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting | Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 7,80% | 3,35% | 157,05% | Rp. 11.400.000,- | 4,31% | Sangat memuaskan |
| Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota | Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali | 44% | 48,71% | 110,70% | Rp.  5.620.000,- | 2,18% | Sangat memuaskan |
| Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sisitem Informasi Perdagangan | Jumlah laporah harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | Rp. 5.620.000,- | 9,6% | Sangat memuaskan |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota | - | - | - | - | - | Ditargetkan ditriwul an II |
| Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida | 100% | 65,41% | 65,41% | Rp. 5.780.000,- | 91,80% | Baik |
|  | Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporang pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 15 laporan | 15 laporan | 100% | Rp. 5.780.000,- | 91,80% | Sangat memuaskan |
|  | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP | 5% | 0% | 200% | Rp. 6.840.000**,-** | 21,11% | Sangat memuaskan |
|  | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi | 70% | 69,23% | 98,90% | Rp. 6.840.000,- | 21,11% | Sangat memuaskan |
|  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang | 70 alat UTTP | 13 alat UTTP | 18,57% | Rp. 6.840.000,- | 21,11% | Sangat memuaskan |

**III.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Dari analisis capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan I tahun 2025 berada diangka 105,12%. Keberhasilan pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% disebabkan beberapa komoditi kebutuhan barang pokok dan barang penting periode Januari-Maret 2025 Stok yang ada melebihi kebutuhan masyarakat. Komoditi tersebut yaitu Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng/Mentega, Daging Sapi, Telur Ayam, Susu, Garam Beryodium dan Pertalite. Dengan disparitas harga antar kecamatan di wilayah Kab. Luwu Timur yang dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di Kab. Luwu Timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.
2. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang dengan angka rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di triwulan I sebesar 3,35% dari target 7,8%. dimana semakin rendah nilai stabilitas yang diperoleh, menunjukkan semakin stabilnya harga bahan pokok pada daerah tersebut . Sehingga dapat disimpulkan variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu cenderung stabil.
3. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 65,41% di tingkat pengecer pupuk subsidi. Realisasi kinerja tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% disebabkan masih terdapat kelompok tani yang belum menebus pupuk bersubsidi disebabkan masih memiliki stok pupuk
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi kinerja sebesar 0%. Keberhasilan pencapaian kinerja program disebabkan belum ada aduan dari pemilik UTTP.

**1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 :**

Sasaran Strategis Kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Variabel pengukuran dalam meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM didukung oleh 4 (empat) variabel pengukuran yaitu :

1. **Indikator Kinerja I**
   1. **Pertumbuhan Nilai Produksi IKM**

Pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 0,12% ditargetkan ditriwulan IV sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil Laporan BPS yang dirilis pada akhir tahun.

**3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi IKM**

* + **Pertumbuhan Nilai Produksi IKM**

Tabel. 7

Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | 0,15% | -% | -% |

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi IKM akan diukur pencapaian kinerja ditriwulan I berdasarkan rencana aksi dan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rumus formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

(Nilai Produksi IKM Tahun –n dikurangi Nilai produksi IKM Tahun n-1 dibagi Nilai Produksi IKM Tahun n-1)) x 100%

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Tahun TW. I Tahun 2024**

Tabel. 8

Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan realisasi TW. I Tahun 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi TW. I Tahun 2024 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | *-* | *-* |

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2025 dan realisasi kinerja TW. I Tahun 2024 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 9

Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan target akhir jangka menengah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Target Akhir Renstra Tahun 2026 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | *-* | *0,16%* |

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2025 dan target akhir Renstra Tahun 2026 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 10

Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2024

*(dibandingkan realisasi secara nasional)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran  Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi terhadap PDB Nasional |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | *-* | *-* |

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2025 dan realisasi terhadap PDB secara nasional disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV angka PDB secara nasional dirilis diakhir tahun berkenaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi IKM :

**1. Program Perencanaan dan Pembangunan industri**

Sasaran program yaitu tersedianya dokumen kawasan industri. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah peraturan Bupati (Perbup) kawasan industri yang ditetapkan. Sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan pencapaian kinerja untuk program perencanaan dan pembangunan industri pencapaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV tahun 2025. Untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan formula rumus :

(Jumlah peraturan bupati tentang kawasan industri yang ditetapkan pada triwulan n- tahun n

= -

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dan pembangunan industri, dan dapat dihitung pada akhir tahun atau pada triwulan IV.

**1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi siteplan kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan IV tahun 2024. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri pada triwulan n- tahun n

= -

1. **Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi siteplan dan amdal. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan II dan Triwulan III tahun 2025. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri pada triwulan n- tahun n

= -

1. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan dan hadycraft. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Target yang ditetapkan ditriwulan I Tahun 2025, sebanyak 10 IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Adapun yang menjadi fokus dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepada para pelaku tersebut yaitu legalitas usaha, manajemen pengelolaan usaha, kualitas mutu produk dan pemasaran. Capaian indikator sub kegiatan diukur dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada triwulan n- tahun n

= 1 Dokumen

**c.** **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan melalui GMP. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing process (GMP). Tahun 2025, pencapaian kinerja untuk sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat ditargetkan ditriwulan II sesuai dengan Rencana Aksi ditetapkan. Untuk mengukur capaian indikator sub kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industridan Peran Serta Masyarakat pada triwulan n- tahun n

= -

**2. Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional**

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional. Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi target program pengelolaan sistem informasi industri nasional ditargetkan ditriwulan II. Formula rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :

(Jumlah Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini pada triwulan n

= -

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional:

**1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan data usaha industri dalam sistem informasi industri nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional. Tahun 2024, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota ditargetkan ditriwulan II dan triwulan II.Formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

(Persentase Usaha Industri yang Terkelolah dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)) x 100%

= -

**a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya data industri yang valid. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS). Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan triwulan I. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

(Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINaspada triwulan n)

= -

**3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Target yang ditetapkan untuk program ini adalah 92,30%, izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali dan direncanakan terealisasi pada triwulan II sesuai rencana aksi.

**1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**

Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 59,09% fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah dan akan direncanakan pada triwulan II sesuai rencana aksi.

**a. Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini telah terlaksana sesuai target 15 izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi, sehingga persentase capaian kinerja untuk sub kegiatan ini sebesar 100%

(Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas Pada triwulan n)

= 1 Dokumen

**2. Indikator Kinerja I**

**a. Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**

Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diintervensi adalah meningkatnya nilai produksi UMKM dengan indikator pertumbuhan nilai produksi UMKM. Adapun target yang ditetapkan untuk sasaran tersebut sejumlah 10,29% dan akan tercapai pada akhir triwulan IV sesuai rencana aksi. Pencapaian tersebut akan ditunjang oleh 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

**SEBARAN UMKM di KAB. Luwu Timur**

*(sumber data :Data Bidang UMKM Tahun 2025)*

**3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**

* + **Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**

**- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 11

Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi UMKM | 10,29% | 10,69% | 103,89% |

Penjelasan:

Pencapaianpositif juga dicapai oleh indikator kinerja utama ke-2 bidang UMKM kaitannya dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM. Tahun 2025 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan ditriwulan I, target untuk pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 9,68% dengan realisasi 10,69%. Nilai capaian kinerja sebesar 103,89 %. Realisasi pertumbuhan nilai produksi UMKM tersebut diperoleh dari formula:

(Nilai Produksi UMKM Tahun –n dikurangi Nilai produksi UMKM Tahun n-1 dibagi Nilai Produksi Tahun n-1)) x 100%

= Nilai produksi UMKM Triwulan I Tahun 2025 – Nilai produksi UMKM Triwulan I Tahun 2024 dibagi Nilai rata – rata produksi UMKM Triwulan I Tahun 2024 x 100%

= Rp. 362.385.000 – Rp. 327.385.000 dibagi Rp. 327.385.000 x 100%

= 10,69 %

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Tabel. 12

Realisasi Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan realisasi Triwulan I Tahun 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran  Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi Triwulan I Tahun 2025 | Realisasi Triwulan I Tahun 2024 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi UMKM | *10,69%* | *0%* |

Penjelasan:

Dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan nilai produksi UMKM ditahun 2025 pada periode yang sama meningkat 10,69% dengan total nilai produksi sebesar Rp. 362.385.000,-

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 13

Realisasi Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target akhir jangka menengah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi Triwulan I Tahun 2025 | Target Akhir Renstra Tahun 2026 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi UMKM | *10,69%* | *10,29%* |

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29%, maka realisasi yang diperoleh ditriwulan I tahun 2025 sudah melampaui target diakhir periode

.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 14

Realisasi Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target secara nasional)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi Triwulan I Tahun 2025 | Realisasi Nasional terhadap PDB |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi UMKM | *10,69%* | *-* |

Penjelasan:

Secara nasional Pertumbuhan nilai produksi UMKM terhadap PBD belum dirilis secara nasional namun untuk Kab. Luwu Timur nilai produksi UMKM ditriwulan I tahun 2025 sebesar 10,69%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM :

1. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator kinerja “persentase usaha mikro menjadi wirausaha. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru (WUB) dibagi Jumlah UMKM yang diinput ke ODS ) x 100%

= 34 WUB /61 UMKM x 100%

= 55,74%

Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 sebesar 55,74% terhadap target sebesar 55% (capaian 101,34%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1. **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru berskala mikro dengan indikator kinerja “ Jumlah wirausaha baru berskala mikro. Untuk mengukur capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru diinput ke ODS dibagi Target wirausaha baru dikali 100%

= 34 WUB/30WUB x 100%

= 113,33%

Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 untuk kegiatan tersebut adalah 34 terhadap target 30 WUB (Capaian 113,33%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1. **Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data usaha mikro yang valid dengan indikator kinerja “ jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS). Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada triwulan (n) tahun-n

= 61 usaha mikro

Berdasarkan penetapan target kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebanyak 61 usaha mikro dari target 61 usaha mikro dengan capaian 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1. **Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro**

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya usaha mikro untuk kemudahan perizinan dengan indikator kinerja jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan pada triwulan I tahun-n)

= 40 usaha mikro

Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro terealisasi pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 40 usaha mikro dari target 40 usaha mikro (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

1. **Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil dalam pengembangan SDM. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan yang dimaksud yaitu dengan mengunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM pada triwulan (n) tahun-n)

= -

Berdasarkan penetapan target kinerja pada rencana aksi, sub kegiatan tersebut ditargetkan ditriwulan II tahun 2025.

1. **Program Pengembangan UMKM**

Sasaran programyaitu meningkatnya usaha mikro yang naik kelas. Program tersebut dilengkap dengan indikator “ Rasio pertumbuhan skala usaha mikro. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun-n dikurangi persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun n-1 dibagi persentase peningkatan skala usaha mikro tahun n-1 x 100%

= -

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk program pengembangan UMKM ditargetkan ditriwulan IV.

**1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dengan indikator kinerja “persentase peningkatan skala usaha mikro”. Untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha dibagi Jumlah UMKM yang terdata pada x 100%

= -

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil ditargetkan ditriwulan IV.

**a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Indikator dari kegiatan tersebut adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Menurut UU No.33 Tahun 2014 khususnya prosedur fasilitasi sisitem jaminan halal, dimana semua permohonan pendaftaran Sistem Jaminan Halal harus melalui aplikasi SiHalal BPJPH Kementerian Agama untuk penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat audit pihak LPPOM MUI.

Untuk mengukur capaian indikator, dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha

= -

Sesuai dengan rencana aksi Target pencapaian kinerja Realisasi kiinerja pada sub kegiatanfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi tahun 2025 ditargetkan ditriwulan III.

**3. Indikator Kinerja I**

**a. Persentase Koperasi Aktif**

Triwulan I Tahun 2025, ditargetkan persentase koperasi aktif sebesar 79,12% dengan realisasi sebesar 79,19% dan capaian kinerja sebesar 100,09%. Jumlah koperasi aktif triwulan I tahun 2024 sebanyak 137 unit koperasi dari total keseluruhan koperasi sebanyak 173 unit koperasi.

**Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**

* + **Persentase Koperasi Aktif**

**- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 15

Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Persentase Koperasi Aktif | 80,00% | -% | -% |

Penjelasan:

Pencapaian yang positif untuk persentase koperasi aktif dengan realisasi sebesar 0% dari target sebesar 80,00% dengan persentase capaian kinerja sebesar 0%). Realisasi persentase koperasi aktif tersebut diperoleh dengan menggunakan formula:

(Jumlah koperasi aktif pada triwulan n- tahun -n dibagi jumlah keseluruhan koperasi) x 100%

= koperasi dibagi 173 koperasi x 100%

= %

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Tahun TW. I 2024**

Tabel. 16

Realisasi Indikator Sasaran II TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan realisasi TW. I Tahun 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi TW.1 Tahun 2024 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Persentase Koperasi Aktif | -% | 79,19% |

Penjelasan:

Triwulan ITahun 2025, persentase koperasi aktif sebesar 0% mengalami peningkatan sebesar 0% dibandingkan dengan tahun 2024 .

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 17

Realisasi Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target akhir jangka menengah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW I. Tahun 2025 | Target Akhir Renstra Tahun 2026 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Persentase koperasi aktif | 80,00% | 80,00% |

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase koperasi aktif sebesar 80,00%, maka realisasi yang diperoleh di Triwulan I Tahun 2025 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 18

Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan realisasi secara nasional)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi secara nasional |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Persentase Koperasi aktif | *-%* | *-%* |

**(*sumber data : Laporan ODS KemenkopUKM periode s/d Maret 2025)***

Penjelasan:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Persentase Koperasi Aktif :

**1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Sasaran program “Meningkatnya Koperasi yang berkualitas” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset pada triwulan (n) tahun berjalan ) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%

= 58/173x 100%

= 33,52%

Realisasi indikator sasaran program ini untuk Triwulan I Tahun 2025 sebesar 33,52% dari target 36,13% (persen capaian 92,78%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1. **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran Kegiatan adalah untuk meningkatnya jumlah koperasi aktif. Sehingga Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi indikator kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah koperasi yang dilakukan oleh pengawasan, kekuatan, kesehatan dan kemandirian pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%

= 39/173x 100%

= 22,54%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk Triwulan I Tahun 2025 sebesar 22,54% dari target 90,20% (persen capaian 40,02%). **Predikat kinerja kurang.**

**a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan koperasi. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan dengan formula :

(Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi pada triwulan (n) tahun berjalan

= 39 koperasi

Realisasi tehadap target untuk sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 39 koperasi dari target 39 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

**2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Sasaran program “Meningkatnya kesehatan koperasi KSP/USP” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi sehat yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi sehat pada tahun berjalan ) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada triwulan (n) tahun berjalan) x 100%

= -

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi ditetapkan diTriwulan II.

1. **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran dari kegiatan adalah meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya merupakan indikator dari kegiatan tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada tahun berjalan )x 100%

= -

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ditetapkan diTriwulan II.

1. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, dengan indikator jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP. Pencapaian sub kegiatan dijabarkan melalui formula dibawah:

(Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP pada tahun n-)

= -

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota ditetapkan diTriwulan II.

**3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

(Jumlah koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan pada tahun berjalan dibagi Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan) x 100%

= -

Target kinerja untuk program pemberdayaan dan perlindungan koperasi ditargetkan ditriwulan III.

* + 1. **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi” dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha yang diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar dibagi jumlah koperasi aktif)x 100%)

= -

Target kinerja untuk kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota ditetapkan ditriwulan III.

1. **Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi pada triwun (n) tahun berjalan)

= -

Target capaian kinerja pada sub kegiatan fasilitasi pemberdayaan, peningkatan produktifitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataam manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha kewenangan kab/kota.

**4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program Ini direncakan pelaksanaanya pada Triwulan IV sesuai Anggaran kas. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwun (n) tahun berjalan)

= -

**1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Iatan direncanakan pada Triwulan IV. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwun (n) tahun berjalan)

= -

**a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota**

Rencana pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwun (n) tahun berjalan)

= -

**4. Indikator Kinerja I**

**a. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan**

Triwulan I Tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 12,50% dengan realisasi sebesar -27,61% dan capaian kinerja sebesar -220,88%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh omzet pedagang dan nilai ekspor. Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2025 senilai Rp. 155.981.700.000,- meningkat dibandingkan omzet pedagang Tahun 2024 pada periode yang sama senilai Rp. 143.289.000.000,- dan nilai ekspor juga mengalami penurunan di Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 3.352.378.888.299,- dibandingkan Tahun 2024 dengan periode yang sama sebesar Rp. 4.702.996.324.320,-

* + **Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan**

**- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 19

Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2025

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan sub sektor perdagangan | 12,50% | -27,61% | -220,88% |

Penjelasan:

Pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 menunjukkan pencapaian negatif dengan angka pertumbuhan sebesar -27,61%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dengan angka yang signifikan dipengaruhi oleh penurunan harga nikel dipasar dunia.

Realisasi perumbuhan seb sektor perdagangan tersebut diperoleh dari formula :

(Nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun-n di kurangi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%

= (Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2025 + Nilai ekspor Triwulan I Tahun 2024)- (Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2025 + Nilai Ekspor Triwulan I Tahun 2024) dibagi ( Omzet pedagang Triwulan I Tahun 2024 + Nilai Ekspor Triwulan I Tahun 2024)

= (155.981.700.000 + 3.352.378.888.299) – (143.289.000.000 + 4.702.996.324.320) dibagi (143.289.000.000 + 4.702.996.324.320) x 100%

= -27,61%

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2023**

Tabel. 20

Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan I Tahun 2023

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi TW. I Tahun 2024 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM | Pertumbuhan sub sektor perdagangan | -27,61% | -12,35% |

Penjelasan:

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama dengan penurunan -15,26%.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 21

Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan target akhir jangka menengah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | Target Akhir Renstra Tahun 2026 |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM | Pertumbuhan sub sektor perdagangan | -27,61% | 12,5% |

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar -27,61% terhadap target akhir renstra sebesar 12,5% maka secara umum masih perlu ditingkatkan karena masih jauh dari target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan.

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 22

Realisasi Indikator Sasaran TW. I Tahun 2024

*(dibandingkan realisasi secara nasional)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis II | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi Secara Nasional |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM | Pertumbuhan sub sektor perdagangan | -27,61% | *-%* |

**(*sumber data :***

Penjelasan:

Laporan Triwulan I 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pertumbuhan sektor perdagangan belum mendapatkan data . Dengan periode yang sama untuk Kabupaten Luwu Timur sub sektor perdagangan bertumbuh sebesar -27,61%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan:

1. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator program pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun-n dikurangi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%

= (Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW. I Tahun 2025 – Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW I Tahun 2024) / Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW. ITahun 2024 x 100%

= Rp 155.981.700.000 – Rp.143.289.000.000 / Rp 143.289.000.000 x 100%

= 8,86%

Realisasi berdasarkan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 8,86% dari target sebesar 10% (capaian 8,86%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

1. **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan

= -

Untuk kegiatan tersebut, dalam perencanaan target kinerja ditetapkan di ditriwulan IV untuk 6 pasar yang telah direvitalisasi akan dimanfaatkan.

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya pada tahun-n

= -

Berdasarkan penetapan target kinerja untuk indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya ditetapkan tahun 2025 sebanyak 6 pasar yang dibangun/direvitalisasi dan ditargetkan ditriwulan IV.

1. **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditargetkan ditriwulan IV. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola pasar yang di-UPTD yang dibina dibagi Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n x 100%

= -

1. **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina pada tahun-n

= -

**2. Program Pengembangan Ekspor**

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan nilai ekspor”. Untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan menggunakan rumus formula :

Nilai ekspor triwulan (n) tahun –n dikurangi Nilai Ekspor triwulan (n) tahun (n – 1) dibagi Nilaii ekspor triwulan (n) tahun (n – 1) x 100%

= Nilai ekspor triwulan I tahun 2025 – Nilai ekspor triwulan I tahun 2024 / Nilai ekspor triwulan I tahun 2024 x 100%

= Rp. 3.352.378.888.299 – Rp. 4.702.996.324.320 / Rp. 4.702.996.324.320 x 100%

= -28,72%

= 36,14%

Sehingga diperoleh realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar -28,72% peningkatan nilai ekspor dengan target kinerja sebesar 15%. Capaian kinerja -191,46%.

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan “ Persentase prosuk yang memperoleh fasilitas promosi dagang. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun berjalan dibagi jumlah produk unggulan x 100%

= -

Tahun 2025, kegiatan promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor ditargetkan ditriwulan II .

**a. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor**

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor tentang peningkatan SDM, daya saing dan promosi dengan indikator jumlah produk unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah pada tahun n-

= -

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi target ditetapkan ditriwulan III.

**b. Sub Kegiatan Pemeran Dagang Lokal**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk UMKM dan produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah pelaku yang difasilitasi dalam pemeran dagang lokal pada tahun n-

= -

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi target ditetapkan ditriwulan IV.

**c. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan indikator “jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan. Adapun target pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan IV atau mengikuti jadwal pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan pada tahun n-

= -

**d. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional pada tahun n-

= -

Tahun 2024, target pencapaian kinerja ditetapkan ditriwulan IV sesuai dengan jadwal Trade Expo Indonesia (TEI) oleh Kementerian Perdagangan

**III.3.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 11 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.072.708.662,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 698.979.769,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 65,16**%.** Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 9,74**%,** sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 55,42**%.**

*Ket : Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran*

Tabel. 23 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II

Triwulan I Tahun 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Renstra** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target TW I. 2025** | **Realisasi**  **Kinerja** | **% Capaian**  **Kinerja** | **Realisasi Keuangan** | **% Capaian Keuangan** | **Predikat Kinerja** |
| Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha | 55% | 55,74% | 101,34% | Rp. 36.300.195 | 75,29% | Sangat Memuaskan |
| Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha baru berskala mikro | 30 WUB | 34 WUB | 113,33% | Rp. 36.300.195 | 75,29% | Sangat Memuaskan |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | 40 unit usaha |  | 0% | Rp. - | -% | Capaian ealisasi keuangan pada triwulan II |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan | 40 unit usaha | 40 unit usaha | 100% | Rp. 24.640.195 | 73,20% | Sangat Memuaskan |
| Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 61unit usaha | 61 unit usaha | 100% | Rp. 11.660.000 | 80,13 | Sangat Memuaskan |
| Program Pengembang an UMKM | Rasio pertumbuhan skala usaha mikro | 6,36% | - | - | Rp. 27.737.400 | 69,34% | Capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV |
| Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase peningkatan skala usaha mikro | 7,77% | - | - | Rp. 27,737.400 | 69,34% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Jumlahn unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusian, serta desain dan teknologi | 13 unit usaha | - | - | Rp. 27.737.400 | 69,34% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Jumlah peraturan bupati (perbup) kawasan industri yang ditetapkan | - | - | - | Rp. 158.868.600 | 75,33% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/  kota | Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Rencana Pembangunan Industri | - | - | - | Rp. 158.868.600 | 75,33% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | 1 Dokumen | 1 dokumen | 100% | Rp. 158.868.600 | 82,05.% | Sangat Memuaskan |
| Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
| Sub kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwukan II dan III |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional | Persentase pengelola  an data usaha industri ke sistem informasi nasional yang terkelola secara standar | 15% | - | - | Rp. - | -% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
| Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/  Kota | Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional (SINAS) | 56,25 | - | - | Rp. - | -% | Capaian kinerja ditargetkan di triwulan II |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/  Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINAS) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | Rp. - | -% | Sangat Memuaskan |
| Program Pengendalian Izin Usaha industri | Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali | 92,30% | -% | -% | Rp. 2.910.000 | 53,05% | Capaian kinerja ditargetkan di triwulan II |
| Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali | 59,09% | -% | -% | Rp.2.910.000 | 53,05% | Capaian kinerja ditargetkan di triwulan II |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | Rp.2.910.000 | 53,05% | Sangat Memuaskan |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam | % |  |  |  |  | Capaian kinerja ditriwulan IV |
| Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi | % |  |  |  |  | Capaian kinerja ditriwulan IV |
| Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota |  |  |  |  |  | Capaian kinerja ditriwulan IV |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi yang berkualitas | -% | -% | -% | Rp. 13.270.000 | 66,82% | Capaian kinerja ditargetkan di triwulan II |
| Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemeriksa an dan pengawas an yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota | -% | -% | -% | Rp. 13.270.000 | 66,82% | Capaian kinerja ditargetkan di triwulan II |
| Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawas | - unit usaha | - unit usaha | -% | Rp. 13.270.000 | 66,82% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase koperasi sehat | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
| Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | - unit usaha | - unit usaha | -% | Rp.- | -% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III |
| Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/  Kota | Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III |
| Sub Kegiatan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tmbah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tmbah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | -unit usaha | - unit usaha | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pertumbuhan omzet pedagang pasar vrakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi | 10% | 8,86% | 88,6% | Rp. 459.893.574 | 64,37% | Sangat Memuaskan |
| Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagang an | Jumlah prasarana/sarana distribusi perdagangan yang ternfaatkan | - | - | - | Rp. 413.793.574 | 65,10% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagang an | Jumlah sarana distribusi perdagangan | - | - | - | Rp. 413.793.574 | 14,14% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat DiWilayah Kerjanya | Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan | - | - | - | Rp, 46.100.000 | 58,55% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan | - | - | - | Rp, 46.100.000 | 58,55% | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan nilai Ekspor | 15% | -12,42% | -82,8% | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase produk yang memperol eh fasilitas promosi dagang | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II dan IV |
| Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang |  |  |  |  |  | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |
| Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasiltasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II |
|  | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi | - | - | - | - | - | Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV |

**III.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Program pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM merupakan program yang berkontribusi ke penanggulangan kemiskinan. Triwulan I Tahun 2025 telah menginfut diaplikasi sebanyak 34 wirausaha baru. Terhadap aspek pemberdayaan UMKM, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah melakukan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi perizinan usaha kepada 40 UMKM dan pendataan terhadap usaha mikro dan kecil untuk triwulan I sebanyak 61 UMKM telah terinput ke dalam sistem ODS. Pendataan UMKM yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan untuk mengukur sejauh mana data yang dihimpun dan diperbaharui secara akurat dan valid sehingga akan membantu perencanaan dan pengambulan keputusan pada sektor UMKM. Sementara untuk sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II.
2. Program pengembangan UMKM dengan indikator rasio pertumbuhan skala usaha mikro untuk capaian kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Pada program pengembangan usaha mikro merupakan program yang memfasilitasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing produk dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM.
3. Program pengembangan ekspor, capaian kinerja kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar -28,72%. Hal ini dipengaruhi oleh nenurunnya harga rata-rata Nikel. Untuk sub kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan ekspor yaitu pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan IV, sub kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor ditargetkan ditriwulan II dan untuk sub kegiatan pameran dagang capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV.
4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi mencapai angka capaian kinerja sebesar 8,86%. Untuk sub kegiatan penyediaan saran distribusi perdagangan berupa revitalisasi sarana dan prasarana pasar ditargetkan ditriwulan III dengan alokasi sebanyak 6 (enam) pasar yang adkan direvitalisasi. UPTD Pasar sebagai penyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara maksimal dari segi minimnya aparatur ASN UPTD Pasar, belum adanya pengalokasian anggaran terkait peningkatan kapasitas pengelola pasar yang ada didesa/kecamatan. Penguatan kelembagaan, manajemen serta kapasitas pengelola pasar berpengaruh dalam peningkatan omzet pasar dan kesejahteraan pedagang.

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 3

Melalui Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dapat terukur melalui capaian indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator sebesar 50,09% dari target kinerja sebesar 98% dengan capaian kinerja sebesar 51,11%.

**- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 24

Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja

*(dibandingkan target)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis III | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 98% | 50,09% | 51,11% |

Penjelasan :

Untuk triwulan I tahun 2025, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 50,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98% dengan angka capaian kinerja 51,11%. Realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis III dapat dihitung dengan menggunakan formula :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah keseluruhan  capaian kinerja kegiatan urusan perangkat daerah | X 100% |
| Jumlah seluruh  kegiatan penunjang urusan perangkat daerah  = 450,81%  X100%  9  = 50,09% |

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW.I Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2024**

Tabel. 25

Realisasi Indikator Sasaran III TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan realisasi TW I. tahun 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis III | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Realisasi TW. I Tahun 2024 |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 50,09% | 88,21% |

Penjelasan :

Untuk triwulan I tahun 2025, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 50,09% dan untuk triwulan I tahun 2025 capaian kinerja program sebesar 51,11%

**- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 26

Realisasi Indikator Sasaran III TW. I Tahun 2025

*(dibandingkan target akhir jangka menengah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis III | Indikator Kinerja | Realisasi TW. I Tahun 2025 | Target akhir renstra tahun 2026 |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 50,09% | 100% |

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 50,09%, maka realisasi yang diperoleh di triwulan I tahun 2025 masih perlu untuk ditingkatkan sebagaimana target Renstra yang ditetapkan dengan nilai sebesar 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis III yaitu :

* **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator yang digunakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk TW. I Tahun 2025 adalah sebesar 98%, terealisasi sebesar 50,09% dengan capaian kinerja 51,11% dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

Rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan indikator kinerja yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu. Tahun 2025, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dari target 100%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu | X 100% |
| Jumlah dokumen  perencanaan, penganggaran dan evaluasi  = 5 dokumen  X100%  5 dokumen  = 100% |

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik dengan indikator kinerja yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% **(predikat kinerja sangat memuaskan)** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah laporan laporan keuangan yang diterbitkan | X 100% |
| Jumlah dokumen  laporan keuangan yang disusun  = 7 dokumen  X100%  7 dokumen  = 100% |

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah target kinerja tahun 2025 sebanyak 2 dokumen laporan penatausahaan barang yang disusun berdasarkan laporan penyusunan asset dan inventaris barang yang dilakukan 2 (dua) semester per tahun dengan realisasi kinerja sebanyak 2 laporan. Untuk tahun 2025 pencapaian kinerja ditargetkan ditriwulan I dan triwulan IV. Realisasi kinerja untuk sub kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja** **sangat memuaskan**. indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah BMD yang diadministrasikan sesuai standar | X 100% |
| Jumlah BMD yang telah diadministrasikan  = 1 laporan  X100%  1 laporan  = 100% |

**4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tercapainya target pendapatan perangkat daerah dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi terhadap target ditriwulan I sebesar 1 laporan dengan capaian kinerja sebesar 100%. **(predikat kineja memuaskan).** Pada kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD dengan formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah laporan pendapatan daerah tahun n- | X 100% |
| Jumlah target laporan pendapatan daerah pada triwulan tahun n-  = 1 dokumen  X100%  1 dokumen  = 100% |

**5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target di triwulan I tahun 2025 sebesar 3 laporan (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja memuaskan.** Indikator kinerja pencapaian yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | realisasi kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | X 100% |
|  | target kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah  = 3 laporan  X100%  3 laporan  = 100% |  |

**6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan ditriwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan realisasi 52,50% (capaian kinerja 52,50%). **Predikat kinerja Cukup.** Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rata-rata realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah | X 100% |
| rata-rata target kinerja administrasi umum perangkat daerah  = 52,50% |

**7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Untuk kegiatan tersebut pencapaian kinerja ditargetkan ditriwulan II tahun 2025. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah pengadaan BMD | X 100% |
| Jumlah rencana kebutuhan  Pengadaan BMD  = - |

**8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 98,31% (capaian 98,31%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | X 100% |
| rata-rata target kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah  = 98,31% |

**9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah BMD yang  telah dipelihara | X 100% |
| Jumlah kebutuhan pemeliharaan BMD  = 22 unit  X100%  22 unit  = 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Capaian Kinerja | Predikat Kinerja | Ket |
| 1 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | Sangat Memuaskan |  |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Sangat Memuaskan |  |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0% | Sangat Memuaskan |  |
| 4 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 0% | Sangat Memuaskan |  |
| 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0% | Sangat Memuaskan |  |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 52,50% | cukup |  |
| 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | TW. II |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98,31% | Sangat Memuaskan |  |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | Sangat Memuaskan |  |
|  |  | 450,81% | Kurang |  |

Pencapaian indikator Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dihitung dengan mengunakan formulasi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah keseluruhan  Capaian kinerja kegiatan | X 100% |
| Jumlah seluruh  Kegiatan  = 450,81%  X100%  9  = 50,09% |

Secara umum pencapaian kinerja program, sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRAM | TARGET KINERJA  TW I. TAHUN 2025 | REALISASI KINERJA  TW. I TAHUN 2025 | % CAPAIAN |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 98% | 50,09% | 51,11% |
| RATA-RATA | | | | 51,11% |

Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis IV pada TW. I Tahun 2025:

1. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk TW. I Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen perencanaan = Jumlah dokumen perencanaan disusun yang disusun tepat waktu tepat waktu pada triwulan (n)

= 1 dokumen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja ditargetkan di triwulan II dan III Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen RKA-SKPD = Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun yang tepat waktu disusun tepat waktu pada triwulan (n)

= -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Koordinasi dan penyusunan RKA-SKP | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | dokumen | - | - | - |  |

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu. Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk TW. I Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen DPA-POKOK Tahun 2024 (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen DPA-SKPD = Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu disusun tepat waktu pada triwulan (n)

= 1 dokumen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun. Realisasi indikator kinerja TW. I Tahun 2025 yaitu sebanyak 3 laporan, berupa laporan Evaluasi Monev RKPD Triwulan I Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025, Evaluasi LKPJ Tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Indikator dari sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah laporan evaluasi kinerja = Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah pelayanan perangkat daerah yang disusun yang disusun pada triwulan (n)

= 3 laporan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun | laporan | 3 | 3 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sasaran sub kegiatan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Target Kinerja TW. I Tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 28 orang. Dengan realisasi 28 orang (Capaian Kinerja adalah 100%). Indikator dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya = Jumlah ASN yang gaji dan terbayarkan tunjangannya terbayarkan

Pada triwulan (n)

= 28 orang

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | Orang | 28 | 28 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. Target Kinerja TW. I Tahun 2025 untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD adalah 7 laporan. Realisasi kinerja sebanyak 7 laporan sehingga capaian kinerja adalah 100%. Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah laporan keuangan = Jumlah laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran SKPD bulanan/triwulanan/semesteran

yang disusun SKPD yang disusun pada triwulan

(n)

= 7 laporan

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun | laporan | 7 | 7 | 100 % |  |

1. **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD. Pencapaian kinerja Tahun 2025 ditargetkan ditriwulan I**.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun | dokumen | 1 | 0 | 0% |  |

1. **Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Target Kinerja TW. I Tahun 2025 untuk sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah 1 dokumen. Realisasi sebanyak 1 dokumen (Capaian Kinerja adalah 0%). **Predikat kinerja sangat kurang**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 0 | 0 % |  |

1. **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan data administrasi kepegawaian, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, Realisasi indikator kinerja untuk TW. I Tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen (persen capaian 0%). **Predikat kinerja sangat kurang**. Indikator dari sub kegiatan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah laporan data administrasi = Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan kepegawaian yang dimutakhirkan

= 3 dokumen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | dokumen | 3 | 0 | 0% |  |

1. **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan untuk sub kegiatan tersebut ditargetkan sebanyak 2 ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan namun sampai dengan akhir triwulan II.

Indikator dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah ASN yang lulus diklat = jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan tugas dan fungsi

= - orang

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI | orang | - | - | - |  |

1. **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Sesuai rencana aksi kegiatannya dilaksanakan di triwulan II dan III, Capaian kinerja digambarkan pada tabel dibawah :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB. KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | orang | - | - | -% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target Kinerja triwulan I tahun 2025 adalah 11 Jenis. Realisasi 11 Jenis sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/  penerangan bangunan kantor yang disediakan | jenis | 11 | 11 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan I tahun 2025 adalah 100%. Target untuk satu tahun ditetapkan di triwulan I sebanyak 4 paket, yang terealisasi sebanyak 4 paket. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | paket | 4 | 4 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor. Target kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 20 paket sedangkan realisasi 20 paket. Sehingga Capaian Kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 20 | 20 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan. Target kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 3 paket sedangkan realisasi 1 paket. Sehingga Capaian Kinerja adalah 33,33 %. **Predikat kinerja kurang**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 3 | 1 | 33,33 % |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target Kinerja ditriwulan I tahun 2025 sebanyak 60 dokumen untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60 dokumen sedangkan realisasi 60 dokumen. Sehingga capaian kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | dokumen | 60 | 60 | 100 % |  |

1. **Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya tamu kantor. Untuk triwulan I 2025 ditetapkan target kinerja sesuai rencana aksi yang diperjanjikan pada triwulan II. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi | laporan | 0 | 0 | 0% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 86,67%. Target triwulan I tahun 2025 adalah 75 laporan yang terealisasi di sebanyak 65. **Predikat kinerja memuaskan**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti | laporan | 75 | 65 | 86,67% |  |

1. **Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah. Triwulan I Tahun 2023, terealisasi 0 dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan dari target 13 dokumen. Capaian kinerja 0%. **Predikat kinerja sangat kurang.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** |  | | | | |  |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** | **KET** |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen arsip dinamis yang di  administrasi kan | dokumen | 13 | 0 | 0% |  |

1. **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya mebel kantor. Sesuai rencana aksi target kinerja ditetapkan ditriwulan II tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja masih 0%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | unit | - | - | - |  |

1. **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor dan mesin lainnya. Sesuai rencana aksi target kinerja ditetapkan ditriwulan II tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja masih 0%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan/  mesin lainnya yang diadakan | unit | - | - | - |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sasaran sub kegiatan adalah tertatanya surat masuk dan surat keluar. Target kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah 375 laporan yang terealisasi 356 laporan atau dengan capaian 94,93%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadminstrasikan | laporan | 375 | 356 | 94,93% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya jasa listrik dan air kantor. Target kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian kinerja sebesar 75%. **Predikat sangat baik.** Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **KET** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | laporan | 4 | 4 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Target Kinerja triwulan I tahun 2025 sebanyak 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 4 | 4 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Target Kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah 10 Unit yang terealisasi sebanyak 10 unit. Capaian kinerja 100%. **Predikat sangat memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 10 | 10 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor. Target Kinerja triwulan I tahun 2025 untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah 12 unit, yang terealisasi sebanyak 12 unit. Sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 12 | 12 | 100% |  |

1. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya. Target Kinerja untuk sub kegiatan tersebut ditetapkan ditriwulan II sesuai dengan rencana aksi yang diperjanjikan. Sehingga pencapaian kinerja masih 0%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **SUB KEGIATAN** | | | | | **KET** |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/  direhabilitasi | Unit | - | - | - |  |

**III.4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Terkait target kinerja untuk sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan akhir triwulan I 2025 belum realisasi karena belanja melalui E-Katalog belum bisa dikarenakan mamakai sistem E-Katalog persi terbaru.
2. Sub kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pad SKPD dengan capaian kinerja sebesar 0%. karena alat dan bahannya dibelanja melalui E-katalog tapi sampai triwulan I belanja lewat E-Katalog belum bisadengan persi terbaru sehingga menunggu sampai triwulan II.

**3.5 Realisasi Anggaran**

Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

S.D Triwulan I Tahun 2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Anggaran** | | | **Permasalahan** | **Solusi dan Rekomendasi Perbaikan** |
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** |  |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)= 4/3\*100* | *(6)* | *(7)* |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.641.601.598 | 1.000.626.764 | 60,95 |  |  |
| II | KEGIATAN PERENCANAAN PENGGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 13.436.250 | 3.500.000 | 26,05 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.697.300 | 3.500.000 | 61,63 |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - | - |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | 1.547.500 | - | - |  |  |
| 4. | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.191.450 | - | - |  |  |
| III | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 1.475.488.438 | 916.024.586 | 62,08 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.461.007.875 | 910.344.586 | 62,74 |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 24.480.583 | 5.680.000 | 23,20 |  |  |
| IV | KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | 9.725.000 | 3.000.000 | 30,35 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.725.000 | 3.000.000 | 30,35 |  |  |
| V | KEGIATAN ADMINISTASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | 2.569.000 | 1.000.000 | 38,93 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2.569.000 | 1.000.000 | 38,93 |  |  |
| VI | KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 3.000.000 | 2.000.000 | 66,67 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.000.000 | 2.000.000 | 66,67 |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - | - | - |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan | - | - | - |  |  |
| VII | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 78.627.160 | 40.147.674 | 51,06 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.339.000 | - | - |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 750.000 | - | - |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.141.760 | 2.006.600 | 93,69 |  |  |
| 4. | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.913.300 | - | - |  |  |
| 5. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1.980.000 | - | - |  |  |
| 6. | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | - | - |  |  |
| 7. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.503.100 | 34.141.074 | 54,62 |  |  |
| 8. | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 8.000.000 | 4.000.000 | 50 |  |  |
| VIII | KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | - | - | - |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | - | - | - |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - |  |  |
| IX | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 37.250.750 | 26.718.504 | 71,73 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.860.750 | - | - |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 18.600.000 | 18.218.504 | 97,95 |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 14.790.000 | 8.500.000 | 57.47 |  |  |
| X | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 21.505.000 | 8.236.000 | 30,30 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.675.000 | 4.226.000 | 28,80 |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.830.000 | 4.010.000 | 58,71 |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Pemeliharaan/  Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - |  |  |
| II | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 27.668.500 | - | - |  |  |
| I | PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.668.500 | - | - |  |  |
|  | Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilatah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 27.668.500 | - |  |  |  |
| III | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 19.859.000 | 13.270.000 | 66,82 |  |  |
| I | KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI,KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA | 19.859.000 | 13.270.000 | 66,82 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 19.859.000 | 13.270.000 | 66,82 |  |  |
| IV | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | - | - | - |  |  |
| I | KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YG WILAYAH KEANGGOTANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA | - | - | - |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - |  |  |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | - | - | - |  |  |
| I | KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | - |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses | - | - | - |  |  |
| VI | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 48.212.000 | 36.300.195 | 75,29 |  |  |
| I | KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN,KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN | 48.212.000 | 36.300.195 | 75,29 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 33.660.000 | 24.640.195 | 73,20 |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | - | - |  |  |  |
| 3 | Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 14.552.000 | 11.660.000 | 80,13 |  |  |
| VII | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 40.000.000 | 27.737.400 | 69,34 |  |  |
| I | KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL | 40.000.000 | 27.737.400 | 69,34 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Fasilitasi Usah Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 40.000.000 | 27.737.400 | 69,34 |  |  |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 714.404.812 | 459.893.574 | 64,37 |  |  |
| I | KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 635.665.061 | 413.793.574 | 65,10 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 635.665.061 | 413.793.574 | 65,10 |  |  |
| II | KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA | 78.739.751 | 46.100.000 | 58,55 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 78.739.751 | 46.100.000 | 58,55 |  |  |
| IX | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 264.649.600 | 11.400.000 | 4,31 |  |  |
| I | KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA | 258.352.600 | 5.620.000 | 2,18 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | 20.518.200 | 5.620.000 | 27,39 |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 237.834.400 | - | - |  |  |
| II | KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK DAN PASTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA | 6.297.000 | 5.780.000 | 91,80 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 6.297.000 | 5.780.000 | 91,80 |  |  |
| X | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | - | - | - |  |  |
| I | KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | - |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pamaran Dagang Nasional | - | - | - |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal | - | - | - |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | - | - | - |  |  |
| 4 | Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor | - | - | - |  |  |
| XI | PROGRAM STANDARDINASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 32.398.500 | 6.840.000 | 21,11 |  |  |
| I | KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN | 32.398.500 | 6.840.000 | 21,11 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi, Legal Berupa Tera, Tera Ulang | 32.398.500 | 6.840.000 | 21,11 |  |  |
| XII | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 210.892.000 | 158.888.600 | 75,33 |  |  |
| I | KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 210.892.000 | 158.888.600 | 75,33 |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 11.667.000 | - |  |  |  |
| 2. | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 193.614.400 | 158.868.600 | 82,05 |  |  |
| 3. | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 5.610.100 | - | - |  |  |
| XIII | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 5.485.050 | 2.910.000 | 53.05 |  |  |
| I | PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | 5.485.050 | 2.910.000 | 53,05 |  |  |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | 5.485.050 | 2.910.000 | 53,05 |  |  |
| XIV | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 6.187.300 | - | - |  |  |
| I | KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | 6.187.300 | - | - |  |  |
| 1. | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 6.187.300 | - | - |  |  |

**

BAB IV

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada triwulan I tahun 2025, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Triwulan I Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | * Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | 98% |
| 2 | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM | * Pertumbuhan nilai produksi IKM * Pertumbuhan nilai produksi UMKM * Persentase Koperasi aktif * Pertumbuhan sub sektor perdagangan | 0,15%  10,29%  80,00%  12,5% |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | * Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 98% |

**Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, rata-rata nilai capaian indikator adalah 9,73%.

**Akuntabilitas Keuangan**

Dari 5 Sasaran Strategis tersebut yang telah didukung oleh program dengan anggaran masing-masing program diperoleh diperoleh data rata-rata penyerapan anggaran pada semua sasaran strategis adalah 57,05%.

**4.2 Saran**

Untuk meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, diharapkan :

* Adanya dukungan berupa kerjasama dari seluruh ASN dan Upah Jasa Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
* Peningkatan penyampaian informasi 1 (satu) data.
* Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

**4.3 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu**

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Triwulan I Tahun 2024 tidak ada dokumen hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah dan di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

***Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah***

***Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian***

***Triwulan I Tahun 2024***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Rekomendasi** | **Rencana Aksi Tindak lanjut** | **Status/Progress Penyelesaian** |
| 1. | Melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan agar mengkordinir penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD | Telah melakukan koordinasi dibeberapa OPD | Sebaiknya di inisiasi oleh Inspektorat agar setiap OPD mengambil apa yang menjadi rekomendasi. |
| 2 | Lengkapi pohon kinerja dengan CSF | Pohon kinerja telah didibuat pada penyusunan Renstra OPD tinggal melengkapi pada tahun-tahun berikutnya | Telah membuat pohon kinerja dengan penjelasan CSF |
| 3. | Tetapkan target kinerja yang lebih menantang, agar pelaksanaan pengelolaan anggaran lebih maksimal dam pencapaian kinerja | Pada penyusunan anggaran ditelah ditetapkan target kinerja yang relevan. | Untuk mencapai terget yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. |